

ANALISIS PERAN AKTOR IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Reflay Ade Sagita, Ida Hayu, Titik Djumiarti

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Integrated waste management is necessary by an area to minimize the negative impacts from the poor waste management. There are some actors who contribute to achieve the objectives from the waste management in implementation of the waste management. The roles between first actors with another actor are not the same, depending on their position in the public policy environment. There are 3 (three) main actors who play a role in implementation of waste management in Semarang, namely Government Bureaucracy, Community Groups and Private Parties.

The purpose of research is to describe and analyze of actor role implementation in policy of waste management in Semarang. Find solution to the inhibiting factors on actor role implementation implementing in policy of waste management in Semarang. The role of the actor can be seen 10 indicators according to the model Grindle.

Keywords: *roles, actors, waste management,*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan suatu masalah yang selalu timbul di kota besar. Pembangunan yang terjadi di perkotaan selalu diiringi dengan penambahan jumlah penduduk. Tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat tentunya memerlukan berbagai kebutuhan pasokan dan produk guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuntutan pasar akan tampilan produk konsumsi yang menggunakan kemasan mempengaruhi timbulan sampah yang ada di kota-kota besar. Pengelolaan sampah yang tidak

baik, akan melahirkan berbagai dampak negatif yang secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan oleh manusia. Seperti pengaruh terhadap kesehatan manusia maupun menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal manusia.

Banyak pemukiman di Kota Semarang masih menggunakan pola pengelolaan sampah secara sentralisasi. Pengelolaan sentralisasi adalah pengelolaan sampah yang terpusat dari daerah yang cakupannya luas. Kelemahan sistem sentralisasi yaitu biaya pengangkutan sampah yang cukup besar dan lahan yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengelolaan cukup luas.

Era Baru dalam pembangunan daerah, yaitu dengan berlakunya UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya telah direvisi dengan UU 32 Tahun 2004, telah memberi kepada daerah untuk dapat mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih optimal. Pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah Kota Semarang berusaha meninggalkan sistem pengelolaan sampah yang menggunakan metode lama, yaitu sistem 3P (pengumpulan, pengangkutan, pembuangan)

Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar diberbagai tempat di Kota Semarang dan juga menyediakan 1 (satu) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sedangkan peran masyarakat masih banyak yang menggunakan pola sentralisasi. Dengan melihat telah tersedianya sarana, prasarana dan kaitan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah kota menunjukkan Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota. Tetapi, melihat meningkatnya timbulan sampah yang ada setiap tahunnya menandakan masyarakat belum sepenuhnya memahami Pengelolaan Sampah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Minimnya peran swasta menandakan pengolahan sampah kota belum dapat membuat investor tertarik untuk turut serta dalam mengelola sampah kota. Merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat agar paham dan dapat melaksanakannya.

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti mengambil judul “**ANALISIS PERAN AKTOR IMPLEMENTASI DALAM**

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG”.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran aktor implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah Di Kota Semarang serta faktor-faktor yang menghambat aktor implementasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah Di Kota Semarang

B. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis peran aktor implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.
2. Menemukan solusi dari faktor-faktor penghambat peran aktor implementasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

C. Kerangka Teori

C.1. Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari kata *policy* yang pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan di dalamnyadan sangat berkaitan dengan proses politik (Islamy, 2004 : 1.3). Kebijakan publik merupakan konsep pengaturan masyarakat yang lebih menekankan proses dan penyusunan peraturan mempunyai tujuan bagi tercapainya kepentingan publik. Pada prakteknya antara hukum dan kebijakan publik saling membantu dan melengkapi dalam membantu pemerintah menjalankan tugas dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik sendiri mempunyai beberapa sudut pandang yang dikemukakan beberapa ahli, yaitu :

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Thomas R. Dye mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. David Easton mengemukakan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.
3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. James E. Anderson berpendapat, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah.

C.2. Proses Implementasi Kebijakan

Mempelajari implementasi kebijakan publik pada hakekatnya berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diformulasikan dan mendapat pengesahan implementasi khususnya berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat. Karena itu guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan

hendaknya kita memahami pula bukan hanya badan administrasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan atau program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok sasaran, melainkan juga berbagai kekuatan social, politik, ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Fungsi implementasi adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai "outcome" atau hasil dari kegiatan pemerintahan. Karena itu implementasi menyangkut kreativitas dari pelaksana kebijakan untuk merancang dan menemukan alat-alat khusus dirancang dan dicari dalam keinginan mencapai tujuan tersebut. Tujuan kebijakan publik diterjemahkan dalam program-program tindakan yang dapat mencapai tujuan.

C.3. Model Implementasi Kebijakan

Model berikutnya adalah model Merilee S. Grindle (1980) dikemukakan oleh Wibawa (1994, 22), Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan antara lain :

- A. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- B. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- C. Derajat perubahan yang diinginkan

D. Kedudukan pembuat kebijakan

E. (siapa) pelaksana program

F. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

C.4. Aktor-Aktor implementasi kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi komunitas (Anderson, 1979; Lester dan Stewart, 2000 dalam Solahuddin K, 2009:100).

- a. Birokrasi
- b. Organisasi Komunitas
- c. Badan Legislatif
- d. Lembaga Peradilan
- e. Kelompok Kepentingan

C.5. Aktor Dalam Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan pembangunan

perkotaan, mempertimbangkan semua aspek terkait, seperti aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek teknis secara simultan, serta memberi peluang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Damanhuri, 2007: 45). Aktor yang terlibat antara lain :

- a. Birokrasi
- b. Kelompok Masyarakat
- c. Pihak swasta

D. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara (*interview guide*), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Lokus penelitian berada Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Kelurahan Miroto; Kelurahan Sekayu; Kecamatan Semarang Tengah; Kelompok Masyarakat yang ada di Kota Semarang; PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Peneliti mengumpulkan data menggunakan panduan wawancara dan software *recorder* yang terdapat pada *Handphone* sebagai alat bantu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, dan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari catatan, buku, dokumen, dan sumber lain. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang

Aktor dalam tahapan implementasi bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun swasta. Mereka memiliki tujuan implementasi yang tidak sama dengan aktor yang lain. Dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah Pemerintah, Kelompok masyarakat dan Swasta. Aktor implementasi dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang antara lain Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Birokrasi Pemerintah, KSM Bondho Sepolo, Kelompok Seruni dan KSM Ngudi Kamulyan selaku Kelompok Masyarakat dan PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari selaku Pihak Swasta.

A.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang Sesuai Dengan Model Grindle.

A.1.1. Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan Pengelolaan Sampah

Bagi dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pengelolaan sampah terpadu akan menjadikan wilayah kota terlihat bersih dan rapi. Hal tersebut dapat digunakan untuk menarik investor yang berminat menanamkan modalnya di kota ini. Dampaknya, akan banyak perusahaan yang berdiri didalam kota dan membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan PAD Kota. Secara tidak langsung pengelolaan sampah terpadu akan menanamkan sikap kepada masyarakat pola hidup bersih dan sehat. Bagi kelompok masyarakat adalah merubah pola pikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan memberikan solusi pengolahan sampah yang dapat dilakukan secara kolektif di TPST ataupun

dirumah sendiri dengan alat sederhana. Sedangkan pihak swasta adalah berjalan proses kerjasama dengan Pemerintah sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah.

A.1.2. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, diketahui manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang baik adalah terciptanya sistem pengelolaan sampah terpadu yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dari hulu hingga hilir. Sistem pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Bagi kelompok masyarakat antara lain memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat yang telah mengolah sampah menjadi kompos dan menjualnya. Lingkungan hidup akan tampak lebih bersih dan asri dengan pengelolaan sampah secara benar dan berwawasan lingkungan. Sedangkan pihak swasta adalah mengurangi timbulan sampah akhir di TPA.

A.1.3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan Dalam Pengelolaan Sampah

Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah di lingkungan tempat tinggal hingga sampah sampai di TPA. Pihak-pihak tersebut antara lain semua produsen sampah dan pihak yang berkepentingan untuk mengolah sampah. Bagi Kelompok masyarakat adalah terlibatnya seluruh warga dalam proses pengelolaan sampah dan pengolahan sampah di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal tersebut sangat berguna untuk mengurangi timbulan sampah di TPS dan mengurangi sampah yang akan terangkut ke TPA.

A.1.4. Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Sampah

Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sudah menjadi tugas Birokrasi Pemerintah untuk mengimplementasikan Perda Pengelolaan Sampah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pengelolaan sampah seperti penyapuan jalan protokol, pembangunan TPST dilingkungan masyarakat, hingga pengolahan sampah di TPA. Bagi kelompok masyarakat dilakukan oleh petugas kebersihan dari Kecamatan dan Kelurahan dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah. Sedangkan pihak swasta dikerjakan oleh pegawai PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari.

A.1.5. Sumber Daya Yang Dikerahkan Dalam Pengelolaan Sampah

Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan antara lain sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Sedangkan Sumber daya yang dimiliki kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sumberdaya manusia yang menjadi pengurus kelompok masyarakat. Tugas utama dari pengurus adalah ikut terlibat dalam pengolahan sampah dan rutin memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah lewat pertemuan yang rutin digelar masyarakat. Bagi pihak swasta berasal dari pengadaan oleh perusahaan tersebut.

A.1.6. Kekuasaan Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah

Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah kota hingga pelimpahan wewenang dari Dinas ke Kecamatan dan Kelurahan perihal pengelolaan sampah juga telah sesuai dengan Perda yang berlaku, yakni melakukan koordinasi antar SKPD. Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga terus mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sampah kota yang dimulai dari sampah di lingkungan mereka. Bagi kelompok masyarakat adalah menerima informasi yang benar dan berwawasan lingkungan yang disosialisasikan secara rutin oleh Pemerintah. Kelompok masyarakat telah memelopori masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengelola sampah yang berada di lingkungan tempat tinggal.

A.1.7. Kepentingan Aktor Dalam Pengelolaan Sampah

Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkepentingan untuk memaksimalkan peran aktor pengelolaan sampah seperti masyarakat dan swasta dalam proses pengelolaan sampah. Dengan begitu, sumber timbulan sampah sampah ditingkat rumah tangga diharapkan akan berkurang dengan pengurangan dan penanganan sampah yang benar dan berwawasan lingkungan oleh masyarakat. Sedangkan kelompok masyarakat mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan mengelola sampah yang mereka hasilkan. Sarana penyampaian informasi oleh kelompok masyarakat dilakukan dalam pertemuan-pertemuan yang secara rutin diadakan oleh masyarakat untuk mengajak masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan sampah dilingkungan. Sedangkan kepentingan pihak swasta dalam pengelolaan sampah adalah pelaksanaan kontrak kerjasama yang telah dibuat dengan Pemerintah untuk mengolah sampah di TPA sebanyak 350 ton per hari.

A.1.8. Strategi Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah

Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah Di Kota Semarang adalah memaksimalkan peran serta masyarakat dalam proses pengurangan dan penanganan mulai dari sumber sampah. Hal tersebut dilaksanakan Pemerintah melalui sosialisasi kepada seluruh aktor pelaksana pengelolaan sampah dan pengadaan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah dilingkungan tempat tinggal. Strategi kelompok masyarakat adalah melaksanakan anjuran pemerintah untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Kelompok masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mengajak peran serta seluruh anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah dilingkungan tempat tinggal mereka. Sedangkan pihak swasta adalah melaksanakan pengolahan sampah sesuai dengan tugas perusahaan, yakni mengolah sampah menjadi pupuk.

A.1.9. Karakteristik Lembaga dan Penguasa Dalam Pengelolaan Sampah

Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah diukur dari Tingkat keberhasilan penyelenggaraan dan partisipasi dari berbagai aktor yang terlibat pengelolaan sampah. Pemerintah telah berusaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan Perda Pengelolaan Sampah. komitmen pihak swasta dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi sampah kota sesuai dengan kerjasama yang disepakati dengan Pemerintah. Sedangkan kelompok masyarakat tercermin dari tindakan-tindakan dari kelompok masyarakat yang dilaksanakan dilingkungan mereka. Mereka menggunakan sarana pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan masyarakat untuk diisi dengan penyuluhan dan

pemberian informasi mengenai pengolahan dan pengelolaan sampah.

A.1.10. Kepatuhan dan Daya Tanggap Aktor Dalam Pengelolaan Sampah

Kepatuhan dan daya tanggap pihak swasta dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan hak dan kewajiban dari PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari. Sesuai dengan kontrak kerjasama dengan pemerintah, hak dari PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari adalah mendapat bahan baku sampah dari TPA Jatibarang sebanyak 350 ton setiap hari dan berhak menempati area disekitar TPA Jatibarang. Kepatuhan dan daya tanggap birokrasi pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari konsistensi penyelenggaraan Perda Pengelolaan Sampah dan penerapan pasal sanksi terhadap pelaku pelanggaran pengelolaan sampah. Penyelenggaraan Perda dan penerapan pasal sanksi menjadikan Pemerintah tanggap dan patuh menjalankan Perda Pengelolaan Sampah dengan benar. Sedangkan kepatuhan dan daya tanggap kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah melaksanakan anjuran Pemerintah untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam proses pengelolaan sampah dengan cara mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Kontribusi kelompok masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dilingkungan mereka adalah mengajak masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga yang mereka hasilkan.

A.2. Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang

A.2.1 Birokrasi Pemerintah

Peran Birokrasi Pemerintah dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah antara lain terlihat dari jenis manfaat yang dihasilkan Kebijakan Pengelolaan Sampah.

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang terintegrasi dari hulu ke hilir, Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah berperan menyediakan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah baik TPS maupun TPST. Menurut derajat perubahan yang diinginkan dari Kebijakan Pengelolaan Sampah, peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan terlihat dari proses sosialisasi pengelolaan dan pengolahan sampah terhadap berbagai aktor yang terlibat. Ini dibuktikan dengan sosialisasi terhadap kelompok masyarakat mengenai pengelolaan dan penanganan sampah di lingkungan rumah tangga dan bekerjasama dengan pihak swasta untuk terlibat dalam pengolahan sampah akhir.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah, peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan terlihat dari koordinasi yang dibangun dengan instansi Pemerintah lain, yakni Kecamatan dan Kelurahan. Fungsi kedua instansi tersebut adalah membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penanganan sampah di lingkungan rumah tangga dengan sumberdaya alat dan tanggung jawab sepenuhnya berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

A.2.2 Kelompok Masyarakat

Kepentingan kelompok masyarakat adalah merubah pola pikir mengenai pengelolaan sampah dan memberikan solusi pengolahan sampah, sedangkan peran kelompok masyarakat disini adalah memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dan mengajarkan pengolahan sampah secara sederhana dengan menggunakan alat sederhana dalam skala rumah tangga.

Peran kelompok masyarakat juga terlihat dari jenis manfaat yang dihasilkan Kebijakan Pengelolaan Sampah, kelompok masyarakat telah berperan untuk mengajak masyarakat mengolah sampah menjadi kompos baik menggunakan alat sederhana

maupun sarana yang telah disediakan Pemerintah.

A.2.3 Pihak Swasta

Peran pihak swasta dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang pada umumnya adalah menjalankan kontrak pengelolaan dan pengolahan sampah yang dibuat bersama dengan Pemerintah.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dan hasil analisis yang dilakukan, kesimpulan yang didapat antara lain:

A.1. Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang

Peran Birokrasi Pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah yakni, penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Perda Pengelolaan Sampah. Ini terlihat dari masih belum lengkapnya alat-alat yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah. Peremajaan dan penambahan alat-alat pengelolaan sampah serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang seharusnya dilakukan setiap tahun tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Disamping itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana pengelolaan sampah secara benar dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan proses sosialisasi hanya dilaksanakan Pemerintah saat awal berjalannya Perda Pengelolaan Sampah. Padahal sudah menjadi tugas Pemerintah sesuai Perda Pengelolaan Sampah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan kelompok masyarakat yang ada dan masih aktif telah melaksanakan pengelolaan sampah dan pengolahan sampah dengan mengajak peran serta masyarakat sesuai dengan informasi yang benar dan berwawasan lingkungan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah antara lain menjadi pelopor dalam masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah. Selain itu, kelompok masyarakat telah menunjukkan berbagai manfaat bagi masyarakat yang telah mengolah sampah, mulai dari terciptanya lingkungan yang bersih, tingkat kesehatan yang semakin baik dan hasil ekonomis dari penjualan kompos hasil olahan sampah. Sudah menjadi tugas Pemerintah untuk membentuk dan membina kelompok masyarakat agar menjadi pelopor kebersihan di lingkungannya. Sedangkan fasilitas pengolahan sampah yang tersedia telah dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat mengolah sampah menjadi kompos. Sementara itu pihak swasta melaksanakan pengolahan sampah tingkat akhir sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Pemerintah, yaitu mengolah timbulan sampah di TPA Jatibarang. Manfaat pengolahan sampah sepenuhnya dinikmati oleh PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari. Bagi pengelolaan sampah kota, manfaat dari pengolahan sampah oleh PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari adalah berkurangnya timbulan sampah di TPA Jatibarang yang berdampak memperpanjang umur TPA.

A.2. Faktor Yang Menghambat Aktor Implementasi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang.

Faktor yang menjadi penghambat utama aktor implementasi kebijakan pengelolaan sampah antara lain : Bagi Birokrasi Pemerintah adalah minimnya anggaran yang tersedia dalam proses pengelolaan

sampah. Hal tersebut yang menjadikan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pemerintah menjadi terhambat, seperti pengadaan sarana dan prasarana, peremajaan alat yang terkait dengan pengelolaan sampah dan pelaksanaan program-program dalam pengolahan sampah.

Bagi kelompok masyarakat, hambatan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan diantaranya tidak semua masyarakat mau melaksanakan pengelolaan sampah yang disosialisasikan oleh kelompok masyarakat. Diperlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya untuk membericontoh dan mengajak masyarakat agar mau mengelola dan menangani sampah dilingkungannya. Hal lain yang menyebabkan kelompok masyarakat kurang leluasa menjalankan program dimasyarakat, karena minim anggaran uang dipergunakan dalam proses pengelolaan sampah. Bagi kelompok yang menggantungkan perputaran uang dari hasil pengolahan sampah di TPST, akan mengalami kesulitan dalam operasional karena hasil produksi olahan sampah belum pasti laku terjual.

B. REKOMENDASI

1. Dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, sudah seharusnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat diwilayah yang dituju karena kelompok masyarakat yang paham karakteristik wilayah dan masyarakat diwilayah tersebut.
2. Karena minimnya anggaran yang tersedia dalam proses pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan diharapkan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu proses pengelolaan sampah.

3. Sehingga beban pekerjaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan bisa sedikit berkurang.
4. Proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus tetap berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya berjalan saat awal sosialisasi Perda yang berlaku.
5. Dalam pelaksanaan untuk melibatkan peran serta masyarakat, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan keberadaan Kelompok Masyarakat dalam perannya di masyarakat seperti mendukung sarana prasarana di lingkungan, membantu pendanaan kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dan pengolahan sampah hingga membantu kelompok masyarakat dalam memasarkan hasil olahan sampah sampai kelompok masyarakat bisa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiningsih, Ni Komang Ayu.2008. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan dan Jomblang,Kota Semarang)*, Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1992, *Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 19 – 2454 - 1992 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*, Depertemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1991, *Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) S – 04 – 1991 - 03 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*, Depertemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2010, *Kota Semarang Dalam Angka*, Semarang
- Budisantoso, Iwan.2011. *Pengelolaan Sampah dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kasus Sampah DKI Jakarta*, Kompasiana
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2006, *Penyusunan Rencana Induk Sistem Persampahan Kota Semarang*. Semarang
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2011,*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang..* Semarang
- Damanhuri, Eri. 2007. *Sampah Indonesia .* Teknik Lingkungan ITB. Bandung.
- Daniel, T. S., Hasan, P. dan Vonny, S. 1985. *Tehnologi Pemanfaatan Sampah Kota dan Peran Pemulung Sampah : Suatu Pendekatan Konseptual.* PPLH ITB. Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah